

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku atau Sumber Lainnya

- Edi, F. R. S. (2016). Teori wawancara Psikodignostik. Penerbit : LeutikaPrio.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Gie. Liang. (1996). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty.
- Iskandar, T. A. (2016). Evaluasi Atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrua (SAIBA) dengan Pendekatan Delone & McLean Information System Success Model (Studi Kasus Mitra KPPN Gorontalo dan Marisa). Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara.
- Jeftin, H., & Afriansyah, H. (2020). Pengertian Administrasi Ketata Usahaan, Proses Administrasi Ketata Usahaan Sekolah, Tata Ruang Kantor/Sekolah dan Peran Guru dalam Administrasi Ketata Usahaan Sekolah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Pengertian Tata Usaha. Diakses pada 14 April 2022, dari <https://kbbi.web.id/tata%20usaha>
- KPPNBogor. (n.d.). Profil : Sejarah KPPN Bogor. Retrieved from Website KPPN Bogor: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bogor/id/profil/sejarah.html>
- KPPN Metro. (n.d.). Memahami SAKTI. Diakses pada 13 Mei 2022, dari <http://kppnmetro.org/memahami-sakti/>
- Kurnia, E. P. (2020). Administrasi Tata Usaha. OSF Preprints .
- Mania, S. (2017). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 220-233.
- Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satori, D. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sihotang, J. S. (2020). PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS LAYANAN DAN KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI). Jurnal SAKuntansi Bisnis dan Publik, 46-54.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing.

Sudarto. (2019). PENGEMBANGAN INTEGRATED FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (IFMIS) DI INDONESIA. JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 87-103.

Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/ PMK.01/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK. 05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.05/ 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/ PMK.05/ 2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.01/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/ PMK.05/ 2018 tentang Pelaksanaan Pilotong Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI*.

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.